

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk pembangunan memerlukan pendapatan yang dapat diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Negara Indonesia menganut asa desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya yaitu dengan memberikan kesempatan serta keleluasan secara penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan otonom daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber daya yang tersedia di daerahnya. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain penerimaan yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan

tarif, bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah, membutuhkan strategi dalam peningkatan penerimaan sektor pajak daerah. Adanya strategi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah agar pemerintah daerah dapat mengurangi masalah dari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Disisi lain peningkatan pajak daerah akan berpengaruh dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah agar kedepan lebih baik. Seiring perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional, maka kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka keuangan pembangunan di daerah menjadi sangat penting. Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat diurai dalam bentuk pajak.

Penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 pada Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses perkembangan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi termasuk adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) penggunaan

informasi canggih teknologi sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson dkk, 2015).

Informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi (Ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Saat ini, tugas-tugas atau pekerjaan manusia dalam organisasi banyak yang telah digantikan oleh komputer termasuk dalam bidang akuntansi. Proses pengolahan data akuntansi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini karena kemampuan komputer dalam mengolah data yang jauh melebihi kecepatan manusia (Jogiyanto, 2005).

Sistem administrasi pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan bagi pelayanan dan pengawasan untuk mengawasi wajib pajak dan petugas pajak dengan optimal agar tidak terjadinya dengan kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah Kota Palopo, pemerintah Kota Palopo membuat beberapa strategi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak (WP) untuk membayar pajaknya dengan jumlah dan tepat waktu. Salah satu strategi yang dibentuk adalah melalui sistem *mobile payment*, merujuk pada pembayaran atas berbagai transaksi atau tagihan secara mobile hanya dengan menggunakan suatu perangkat seperti *smartphone*. Badan Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah mengoptimalkan teknologi berbasis aplikasi dalam konteks

penerimaan pajak dan retribusi daerah yang disebut dengan Aplikasi SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah) Aplikasi Simpada merupakan bentuk kolaborasi Pemerintah Kota Palopo dengan Bank SulSelBar. Selain itu manfaat yang menguntungkan dari sistem aplikasi SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah) yaitu melayani masyarakat selama 7x24 jam dan juga membantu pemerintah daerah melakukan pemantauan penerimaan daerah atas pajak dan retribusi daerah, juga dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, melaporkan dan membayar pajaknya secara mandiri.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai peningkatan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah, maka saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang peran pemerintah daerah Kota Palopo dalam melakukan peningkatan sistem aplikasi melalui **“Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan akuntansi daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat khususnya mengenai pengaruh penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kantor BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Palopo. Penelitian ini berfokus pada pengaruh penggunaan aplikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi perbandingan mengevaluasi dan menciptakan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan mengkaji kualitas nilai sistem aplikasi meliputi ketetapan waktu, akurasi, relevansi, dan kepercayaan.

Batasan masalah dilakukan agar penelitian berfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga penelitian ini tidak meluas dan menyimpang. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini hanya

berfokus mengenai pengaruh penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Technology Acceptance Model* (Theory TAM)

Liliani (2020) TAM adalah model penelitian yang dipergunakan untuk memprediksi adopsi teknologi informasi yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan dipenerimaan (*acceptance*) bagi pengguna terhadap suatu sistem informasi TAM. TAM juga menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi ini dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan bagi penggunanya) dan perilaku, tujuan atau keperluan serta penggunaan aktual dari pengguna/user suatu sistem informasi.

Ajzen dan Fishbein 1980 menurut model penerimaan teknologi TAM diangkat dari teori perilaku yang direncana dan teori tindakan yang beralasan. Menurut Azjen 1985 merupakan teori psikologi sosial berdasarkan pada teori perilaku yang sudah terencana dan teori tindakan beralasan Ajzen dan Fishbein 1980. TAM dapat memberikan hubungan kausal yang terbentuk berdasarkan dari kepercayaan, sikap, niat, perilaku yang digunakan untuk mengembangkan dan memprediksi potensi penerimaan sebuah pengguna teknologi (Liliani,2020), Agar orang dapat percaya maka suatu tindakan untuk mengambil keputusan berdasarkan perilaku dengan mempertimbangkan sikap, keyakinan dan niat.

2.1.2 Sistem Aplikasi

Sistem ini terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semua sistem memiliki input, proses, output dan umpan balik. Salah satu contohnya adalah sistem informasi komputer; sementara itu sebuah organisasi adalah contoh lainnya. Menurut definisi tersebut dapat diartikan bahwa sistem aplikasi adalah jenis perangkat lunak (*software*) yang secara langsung menggunakan teknologi seperti *handphone/computer* untuk melakukan tugas yang ditentukan pengguna.

Kemunculan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Mulyadi (2014:21) mendefinisikan teknologi informasi "Teknologi Informasi adalah meliputi komputer (baik *Hardware* dan *Software*), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi". Menurut Sartika & Yuliantoro (2019) teknologi informasi adalah suatu teknologi untuk mengelola data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi informasi digunakan dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Teknologi informasi dapat memberikan andil dalam proses komunikasi individu secara efektif khususnya dalam menembus ruang dan waktu ketika berkomunikasi dengan individu lainnya

Penjelasan teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni (2013:10) menjelaskan bahwa “Teknologi Informasi adalah pendalaman pemanfaatan perlengkapan elektronika, terutama komputer untuk mengarsipkan, mempelajari, dan membagikan informasi apa saja termasuk kata-kata angka dan gambar” Sedangkan menurut Richardus Eko Indrajit (2011:2) memaparkan teknologi Informasi sebagai “Suatu teknologi yang berkaitan dengan penggarapan data menjadi informasi dan prosedur penyebaran informasi tercantum pada garis ruang dan waktu”.

a) Tujuan dan Fungsi

Teknologi informasi tentunya dibuat dengan berbagai tujuan dan fungsi untuk menunjang aktivitas manusia. Maka tujuan teknologi Informasi menurut Sutarman (2009:17) adalah:

- 1). Untuk mengembangkan kreativitas
- 2). Untuk menyelesaikan masalah
- 3). Untuk menaikkan efektivitas dan efesiensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Sutarman (2009:18) juga mengutarakan 6 (enam) fungsi dari teknologi informasi adalah sebagai berikut :

- 1). Menangkap (*Capture*) yaitu merupakan suatu proses penangkapan pada suatu hal yang akan menjadi data masukan.
- 2). Mengolah (*processing*) yaitu mengoperasikan catatan rinci dan kegiatan, contohnya memperoleh *input* dari *keyboard*, *scanner* dan sebagainya. Sehingga mengatur/memproses data informasi yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan/pemrosesan data dapat berupa konversi

pengubahan data ke bentuk lain, analisis, perhitungan, sintesis segala data dan informasi.

- 3). Menghasilkan (*Generating*), mewujudkan atau mengintegrasikan informasi ke dalam format yang bermanfaat. Misalnya laporan, table grafik dan lain-lain.
- 4). Menyimpan (*storage*) mengabadikan atau mengarsipkan data informasi dalam suatu alat yang bias digunakan untuk kebutuhan lainnya.
- 5). Mencari kembali (*Retrival*), melewati, memperoleh lagi informasi dan menkopi data informasi yang telah tercatat.
- 6). Transmisi (*Transmission*), yaitu mentransfer data dari suatu tempat lain melalui jaringan komputer.

b) Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPADA)

Sistem Aplikasi yang digunakan di Bapenda Kota Palopo adalah Sistem Aplikasi Simpada (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah) Aplikasi Layanan Sistem digital ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Palopo dan Bank Sulselbar yang diluncurkan pada awal Juni 2021 lalu. Simpada adalah sistem pembayaran dalam bertransaksi yang berbasis digital sehingga dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan pajak dan retribusi daerah atau penerimaan PAD secara keseluruhan. Aplikasi Simpada dapat digunakan untuk mengelola data penerimaan pajak secara realtime sehingga mempermudah Pemerintah untuk memonitor pencapaian penerimaan pajak daerahnya. Begitu pula aplikasi ini juga dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Simpada dibangun dengan tujuan membantu Pemerintah

Daerah untuk memantau penerimaan daerah atas pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah juga dapat langsung melaporkan penerimaan daerahnya. Adapun Keunggulan Aplikasi Simpada yaitu Pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan secara online dengan menggunakan single identitas (NIK). Selain juga makin memudahkan masyarakat karena terhubung ke semua channel pembayaran Bank Sulselbar. Tidak hanya sebagai sistem pembayaran pajak, SIMPADA juga bisa menjadi bagian untuk integrasi dari sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak. Proses pembayaran menggunakan kode billing, sehingga memudahkan penelusuran transaksi. Dalam hal ini, juga ada modul Pelaporan yang dapat diakses secara online secara harian dan atau periodic sebagai platform digital yang dilengkapi kemudahan terhubung dengan aplikasi lainnya, seperti OVO, Gopay, dan Link Aja. Sedangkan bagi wajib pajak, tambahnya aplikasi ini dapat membantu wajib pajak untuk mendaftar, melaporkan dan membayar pajaknya secara mandiri. Dengan adanya platform digital ini merupakan langkah untuk mewujudkan sistem digitalisasi pembayaran yang akuntabel dan transparan. yang akan mempermudah pekerjaan dan lebih fleksibel sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan aplikasi SIMPADA, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara terintegrasi. Retribusi seperti jasa umum, usaha, perizinan, termasuk Izin Membangun Bangunan (IMB) dan lainnya. Dengan sistem terintegrasi, potensi terjadinya selisih atau kesalahan pajak sudah tidak ada karena langsung terhubung dengan data Bapenda. Mekanisme kerja dari sistem ini adalah berupa pemasangan Alat Monitoring Data Transaksi Usaha secara *Online*.

Dimana alat ini juga bertujuan untuk menyimpan setiap data transaksi usaha wajib pajak yang terjadi, serta dapat dipantau dari *dashboard* (sistem monitoring) yang berada di Bapenda Kota Palopo secara *Online dan realtime*. Indikator untuk mengukur penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah di dalam penelitian ini, yaitu :

a) Ketetapan

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

b) Keamanan

Keamanan Data menjadi prioritas utama di sistem Aplikasi . Sistem Aplikasi yang berkolaborasi dengan pemkot dan bank sulsebar resmi yang menyediakan layanan pajak dan retribusi daerah berbasis digital, adanya manfaat menggunakan Aplikasi Simpada bisa memberikan sistem keamanan yang terjamin.

c) Keandalan

Keandalan dalam Penggunaan Sistem Aplikasi Adalah Pemenuhan pelayanan segera dan memuaskan. Keandalan mencakup kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan.

d) Konsistensi

Konsistensi dalam Penggunaan Sistem Aplikasi adalah informasi tidak boleh kontradiksi di dalam penyajiannya karena konsistensi merupakan syarat penting bagi pengambilan keputusan.

2.1.3 Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Mardiasmo (2011:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah.

Menurut UU No.28 Tahun 2009, pengertian pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah untuk masing masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD

dalam Laporan Realisasi APBD. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintah Kab/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

a) Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan beranegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- 1). Fungsi Penganggaran (*Budgetair*) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
- 2). Fungsi Pengaturan (*Regulered*) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam

rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

- 3). Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4). Fungsi Retribusi Pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setian orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Nurlan (2008 : 35-36), Retribusi Daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepentingan individu atau kelompok.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

a) Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki peran besar dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan ketika diterapkannya otonomi daerah, Desentralisasi dalam artian pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemerintah. Tetapi, yang tak kalah penting adalah desentralisasi fiskal. Karena dengan adanya otonomi daerah, berarti akan ada biaya untuk itu, maka dengan desentralisasi fiskal lah salah satu bentuk yang akan mengisi kebutuhan anggaran tersebut. Retribusi sebagai salah satu sumber PAD menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011:1). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a) Peranan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu sisi untuk mendukung kebijakan makro nasional yang strategis, dan di sisi lain desentralisasi akan mengalami proses

pemberdayaan yang penting dengan desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada provinsi. Selain itu, otonomi daerah memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1). Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- 2). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- 3). Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017:19).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut secara sah melalui pajak daerah, iuran anggota daerah, hasil pengolahan aset daerah, dan dana dari pendapatan PAD lain yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator untuk mengukur peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini, yaitu:

a) Pengelolaan APBD

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Dengan adanya penggunaan sistem aplikasi terhadap pengelolaan APBD berjalan dengan baik atau tidak.

b) Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sebagai suatu tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas perusahaan yang digunakan

sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu rencana.

c) **Pertumbuhan Ekonomi**

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

d) **Belanja Modal**

Suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya yang dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya, Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.

2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memosisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Puja Rizqy Ramadhan, 2019) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten /Kota Di Sumatera Utara.	Pendekatan Asosiatif . Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sumatera Utara. Sama halnya dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sumatera Utara. Selain itu, dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah secara simultan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2	(Sri Mulyani, 2021) Pengaruh Penggunaan Sistem Mobile Payment Online System (MPOS) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada badan pendapatan daerah kabupaten jeneponto)	Metode Kuantitatif . Mobile Payment Online System (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Hasil penelitian yang telah di analisis menunjukkan bahwa Penggunaan Alat Mobile Payment Online System berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan BAPENDA dapat memaksimalkan penerapan system monitoring pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama di sektor Pajak Hotel dan restoran. Setiap pelaksanaan program ataupun pengelolaan

			keuangan dapat memperhatikan segala aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas agar sumber daya yang dikelola dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
3	(Eka Kurniasari, 2020) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening	Metode Kuantitatif. Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Z) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Hubungan langsung retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah negatif. Dikarenakan pengaruh ini memiliki hasil rata-rata penerimaan retribusi daerah berada dalam kategori sedang, hasil tersebut dinilai rendah jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa (biaya operasi, dan modal) oleh pemerintah. Itulah dari adanya biaya yang besar tersebut mengakibatkan nilai retribusi daerah menjadi negatif terhadap PAD.
4	(Yulia Komala, 2021) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta	Metode Deskriptif Asosiatif. Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak Daerah secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap PAD kabupaten Purwakarta dari tahun 2009-2018. berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pajak daerah secara bersamaan mampu menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi terhadap PAD

			kabupaten Purwakarta.
5	(Rahmi Dwi Putri, 2020) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto	Metode Kuantitatif. Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Menyatakan Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Sawahlunto. Dikarenakan bahwa semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto.
6	(Ghulam Imam Sefandra, 2021) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Metode Teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Menyatakan bahwa pajak daerah memiliki hasil positif atau signifikan terhadap PAD. Artinya, semakin banyak pajak daerah yang di dapat oleh suatu daerah tersebut maka sangat berpengaruh pada pendapatan suatu daerah. Kemudian retribusi daerah memiliki pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya banyak atau tidaknya penerimaan retribusi daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kota Batam.
7	(Chusnul Chatimah Roni, 2021) Penerapan Kebijakan With Holding Tax System Terhadap Jasa	Metode Kualitatif. Penerapan pelaksanaan with holding tax	menunjukkan bahwa penerapan kebijakan dengan konsep with holding tax system dalam jasa pemasangan reklame

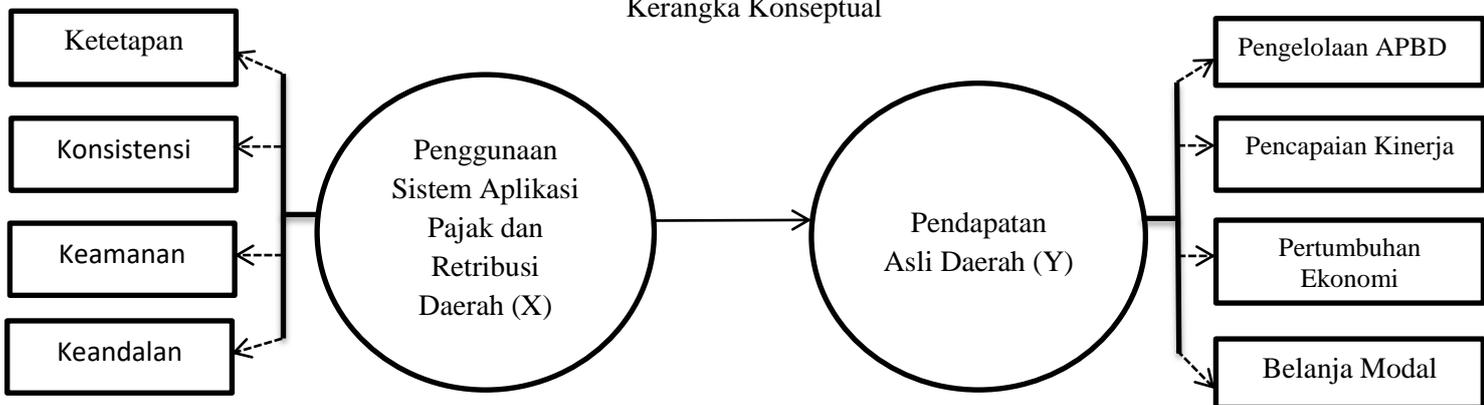
	Pemasangan Reklame Di BAPENDA Kota Palopo.	system (X1) Jasa Pemasangan Reklame (X2) Badan Pendapatan Daerah (Y)	di Bapenda Kota Palopo berjalan efektif dan menunjukkan keberhasilan dalam penerapannya. Hal ini dilihat dari persentase target penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan selain itu, para konsumen juga merasakan kepuasan dan kemudahan dalam pelayanan Bapenda Kota Palopo menggunakan with holding tax system.
8	(Sirajuddin, 2021) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng	Metode Kuantitatif. Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) diterima. Hal ini diartikan setiap peningkatan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Soppeng, oleh karena itu pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Soppeng. Sedangkan Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan karena terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih sangat kecil dikarenakan porsi retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah.

2.3 Kerangka Konseptual

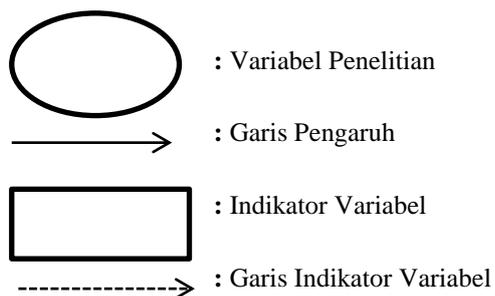
Kerangka Konseptual menunjukkan hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah Penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Tinjauan pustaka dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan Gambar :



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (*independent variabel*) adalah Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah Sedangkan variabel terikat (*dependent variabel*) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah solusi jangka pendek (sementara) untuk pertanyaan-pertanyaan yang diangkat oleh penelitian yang harus divalidasi secara empiris terhadap penelitian sebelumnya tentang permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan diajukan untuk diteliti adalah :

H1 : Diduga bahwa Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah studi ilmiah yang sistematis tentang bagian dan fenomena serta kualitas hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan model matematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena

Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data ini menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo dengan menggunakan data informasi dan fenomena yang terjadi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini, tempat penelitian terletak di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan tahun 2023.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah area generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo.

3.3.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling* yaitu metode pemilihan sampel dimana setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *Purpose Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita. Kriterianya adalah Pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo di beberapa bidang. Berdasarkan teknik yang digunakan peneliti mengambil sampel sebanyak 40 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data Primer merupakan data empiris dari informan. Pada penelitian ini data yang di peroleh peneliti melalui proses wawancara, observasi maupun membagikan kuesioner langsung terkait Penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah terhadap Peningkatan Penadapatan Asli Daerah di BAPENDA Kota Palopo yang dijadikan sebagai informan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan penelitian ini dilakukan dengan cara :

- 1) Observasi, Penelitian ini melakukan pengamatan secara eksklusif dilokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan di tempat yang sama ataupun yang berbeda. Observasi ini di fokuskan dipengamatan eksklusif terhadap masalah yang terjadi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Terlebih khususnya permasalahan mengenai Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kota Palopo.
- 2) Wawancara, dengan instrumennya berupa pertanyaan untuk mengumpulkan informasi-informasi pendukung yang melengkapi penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pihak atau pegawai Bapenda Kota Palopo.
- 3) Kuesioner, yang berisi pertanyaan dalam pengumpulan data. Menggunakan *skala likert* dalam mengukur jawaban dengan *skala likert* dalam mengukur jawaban dan pendapat responden menggunakan lima tingkatan penilaian berupa pertanyaan.

3.5.1 Skala Pengukuran Likert

Skala pengukuran likert adalah skala untuk melengkapi angket yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian atau titik tolak penyusunan item-item instrumen yang berbentuk pertanyaan atau pernyataan dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, yaitu:

Tabel 3.1 Alternatif Jawaban Skala Likert

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Dengan melakukan proses analisis tersebut, maka data yang diperoleh akan memberikan gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi penelitian, yang kemudian akan memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti sehingga data tersebut dapat di analisis ke dalam uraian dasar yaitu berupa suatu kesimpulan dan saran.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (Variabel Terikat)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

- a) Ketetapan
- b) Konsistensi
- c) Keamanan
- d) Keandalan

2. Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah (Variabel Bebas)

Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Bapenda Kota Palopo. Sistem Aplikasi yang digunakan di Bapenda Kota Palopo adalah Sistem Aplikasi Simpada (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah). Simpada adalah sistem pembayaran dalam bertransaksi dengan menggunakan alat teknologi berupa *handphone* dan *PC* yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan pajak dan retribusi atau penerimaan PAD secara keseluruhan. Indikator untuk mengukur penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah di dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Ketetapan
- b) Keamanan
- c) Keandalan
- d) Konsistensi

3.7 Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Instrumen Penelitian

Beberapa pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden perlu di uji terlebih dahulu agar peneliti dapat mengetahui apa saja kekurangan pertanyaan dan pernyataan yang diajukan. Selain itu, uji instrumen penelitian bertujuan untuk menyaring pernyataan penelitian yang dianggap penting untuk diajukan, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada kuesioner. Adapun uji instrumen sebagai berikut :

1). Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2015) “instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan data (mengukur) itu valid”. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir menggunakan analisis item, yaitu mengkolerasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari keseluruhan skor tiap butir. Untuk menguji tingkat validitas data menggunakan program dengan menggunakan Korelasi *Bivariate Person*. Pengujian validitas ini menggunakan *person correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *pearson correlation* yang didapa memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid.

2). Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2015) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek akan menghasilkan

data yang sama. Pengujian reabilitas instrumen dilakukan dengan program SPSS dengan menggunakan rumus *alpha cronbach's* 0,60 maka hasil tersebut reabel.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui karakteristik variable yang diteliti misalnya seperti mengetahui nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi, pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan.

3.8.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis regresi linear sederhana. Metode analisis regresi sederhana ini digunakan untuk menguji signifikan Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Yang dinyatakan dalam bentuk fungsi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Standar Error

Untuk mengolah pengolahan data digunakan sistem komputerisasi program SPSS.

3.8.3 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variable. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*signifinance*) jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0.05 , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variable tetap dan variable dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. terikat secara parsial. Namun jika nilai t atau signifikansi >0.05 , maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.8.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk keseimbangan atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang ditentukan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, oleh sebab itu yang digunakan adalah nilai R^2 *square*. Akan tetapi jika analisis yang digunakan adalah regresi berganda maka yang digunakan adalah *adjusted R² square*. Sehingga hasil perhitungan nilai R^2 *square* dapat dilihat pada output model *summary*. Pada kolom *adjusted R²* dapat diketahui berapakah persentase yang bisa dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak geografis Kota Palopo berada pada 2°53'14"- 3°04'08" Lintang selatan dan 120°03'34" Bujur timur. Letak Kota Palopo sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geografisnya yaitu berbatasan dengan Kecamatan Walenrang di sebelah utara, berbatasan dengan teluk Bone jika ditinjau dari arah timur, sedangkan di sebelah Selatan Kota Palopo akan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bua. Untuk daerah Barat Kota Palopo akan berbatasan langsung dengan kecamatan Tondon Nanggala wilayah Toraja Letak Kota Palopo memberikan dampak positif dan negative bagi eksistensinya. Karena keberadaan Kota Palopo akan berimbas pada lalu lintas yang ada.

Jika ditinjau dari wilayah Administrasi Kota Palopo memiliki luas yaitu 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk pembagian wilayah, Kota Palopo memiliki 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Sebelum terbentuknya Bapenda di Kota Palopo, adanya Dispenda Kota Palopo yang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Seiring berjalannya waktu, Dispenda Kota Palopo mengalami perubahan nama lagi jadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo dan adanya peraturan daerah Kota Palopo No. 8 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kota Palopo. Terbentuknya Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA)

Kota Palopo di tahun 2017 untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, sebelumnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo yang mengelola Pendapatan Daerah.

Tujuan Pembentukan BAPENDA yakni mengoptimalkan segala bentuk Pendapatan Daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan peraturan dan ketentuan pajak daerah maupun pungutan lainnya secara efektif.

1. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

a) Visi

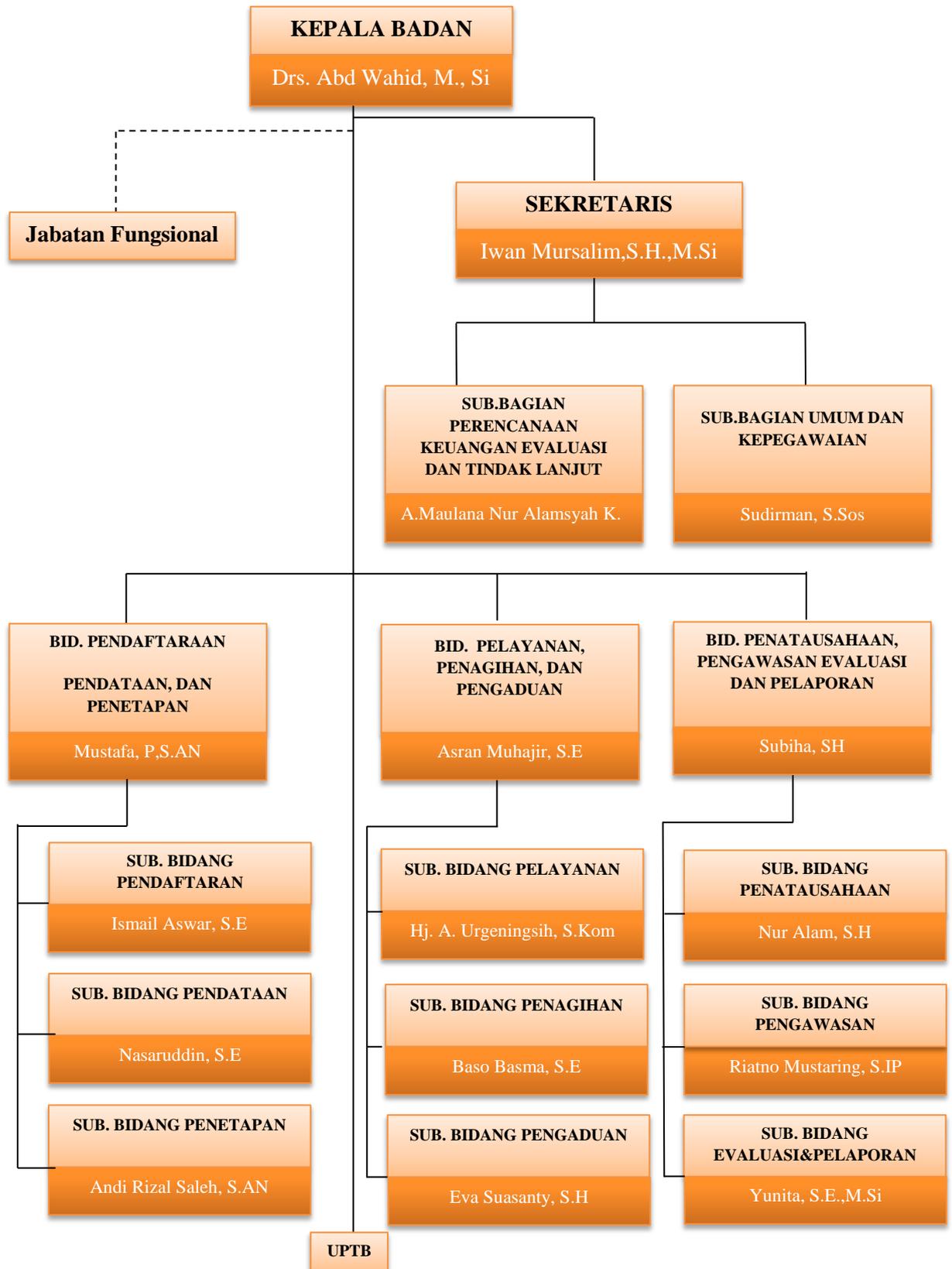
Terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung kota palopo sebagai kota jasa.

b) Misi

- 1) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksana pengelolaan pendapatan daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- 5) Meningkatkan koordinasi, Pengendalian, Penatausahaan, dan Pengawasan.

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

Gambar 4.1 Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo



4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 4.1 data indikator penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah

Item Pernyataan	Jawaban					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	4.00
X1	0	0	0	10	30	4.75
X2	0	0	1	24	15	4.35
X3	0	0	1	19	20	4.48
X4	0	0	3	15	22	4.48
X5	0	0	1	18	21	4.50
X6	0	0	1	21	18	4.43
X7	0	0	7	21	12	4.13
X8	0	0	2	16	22	4.50
X9	0	0	0	16	24	4.60
X10	0	0	0	17	23	4.58

Sumber data primer tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1 yang menunjukkan hasil dari 40 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 0 orang, jawaban setuju (S) 10 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 30 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa dengan diterapkannya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) ketetapan pendapatan asli daerah semakin meningkat.

Pada pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 1 orang, jawaban setuju (S) 24 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 15 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada)

dapat mewujudkan keandalan pengelolaan pendapatan asli daerah menjadi fokus KPK.

Pada pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 1 orang, jawaban setuju (S) 19 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 20 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) meningkatkan konsistensi pendapatan asli daerah.

Pada pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 3 orang, jawaban setuju (S) 15 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 22 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) dapat memberikan manfaat keamanan pada pendapatan asli daerah.

Pada pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 1 orang, jawaban setuju (S) 18 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 21 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) lebih konsistensi dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan yang tidak menggunakan.

Pada pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 1

orang, jawaban setuju (S) 21 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 18 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” (S) bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) membantu dalam hal keamanan dan control data pajak yang masuk ke server.

Pada pernyataan ketujuh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 7 orang, jawaban setuju (S) 21 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 12 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “setuju” (S) bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) memungkinkan ketetapan wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam melaporkan besarnya pajak.

Pada pernyataan kedelapan, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 2 orang, jawaban setuju (S) 16 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 22 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) membantu dalam mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah.

Pada pernyataan kesembilan, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 0 orang, jawaban setuju (S) 16 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 24 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih

jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah membantu ketetapan penerimaan pajak.

Pada pernyataan kesepuluh, responden yang memilih jawaban sangat setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 0 orang, jawaban setuju (S) 17 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 23 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” bahwa adanya sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Penggunaan sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan hasil pernyataan kuesioner yang telah diberikan kepada responden dengan hasil wawancara oleh Bapak Fadly selaku Koordinator IT menyatakan:

“Kalau untuk sistem aplikasi nya sekarang yang kami tempuh itu dengan menggunakan aplikasi baru yang masih bekerjasama dengan Bank SulSelBar aplikasi itu bernama SIMPADA ini, didalam aplikasi tersebut sudah teralur mekanismenya dia dari pendaftaran, pelaporan dan itu nanti kita buat user kesemua pengguna wajib pajak jadi mungkin dengan itu cara kita mengetahui berapa omset mereka perbulan, omset mereka pertahun. Jadi aplikasi SIMPADA ini sangat membantu, dengan adanya SIMPADA itu startegi yang sangat efektif karena aplikasi ini sementara berjalan dan efektif untuk para wajib pajak dimana aplikasi monitoring/WP itu sudah beberapa WP rangkul untuk memakai aplikasi itu allhamdulillah efektivitas dan sosialisasinya sangat mudah dalam mengenalkan ke wajib pajak, artinya dia begini aplikasi itu si wajib pajaknya biar diluar daerah dia bisa pantau dia percayakan kekasirnya dia bisa tau dari aplikasi itu meskipun dia tidak ada ditempat dengan ini kami memanfaatkan teknologi.” (hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2023)

Ungkapan dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan adanya teknologi yang semakin canggih sekarang ini mampu dimanfaatkan oleh BAPENDA Kota Palopo sebagai dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.2 data indikator pendapatan asli daerah

Item Pernyataan	Jawaban					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Y1	0	0	1	15	24	4.58
Y2	0	0	0	17	23	4.58
Y3	0	0	3	16	21	4.45
Y4	0	0	2	14	24	4.55
Y5	0	0	2	7	31	4.73

Sumber data primer tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 yang menunjukkan hasil dari 40 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 1 orang, jawaban setuju (S) 15 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 24 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) dapat membantu pengelolaan APBD menyusun laporan keuangan.

Pada pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 0 orang, jawaban setuju (S) 17 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 23 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) pencapaian kinerja semakin meningkat.

Pada pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 3 orang, jawaban setuju (S) 16 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 21 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Pada pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 2 orang, jawaban setuju (S) 14 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 24 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah (simpada) dapat meningkatkan belanja modal.

Pada pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) 0 orang, jawaban tidak setuju (TS) 0 orang, jawaban netral (N) 2 orang, jawaban setuju (S) 7 orang dan jawaban sangat setuju (SS) 31 orang. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih jawaban “sangat setuju” (SS) bahwa kerja sama antara pemungut pajak dan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan asli daerah di masa depan.

Pendapatan asli daerah di kota palopo sesuai dengan hasil pernyataan kuesioner yang telah diberikan kepada responden dengan hasil wawancara oleh Bapak Andhika selaku Kasubang Umum menyatakan :

“Bapenda ini bekerjasama dengan pemungut pajak dengan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga kantor ini membutuhkan aplikasi pajak dan retribusi daerah agar pencapaian kinerja

semakin meningkat dan juga membantu pengelolaan APBD menyusun laporan keuangan, untuk setiap bulannya kantor ini juga melakukan evaluasi penerimaan disektor pajak semua kita lakukan, dimana kita bisa melihat rendah nah itu bisa kita cari penyebabnya". (hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2023).

Ungkapan dari hasil wawancara menjelaskan bahwa bapenda akan bekerja sama dengan pemungut pajak dengan wajib pajak sehingga bapenda membutuhkan aplikasi pajak dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga membantu pengelolaan APBD menyusun laporan keuangan.

4.3 Deskripsi Data/Responden

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kemudian data sekunder yang berupa wawancara kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Koordinator IT Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Berdasarkan data yang berhasil di kumpulkan, kuesioner yang disebar ada beberapa bidang, yaitu bidang umum, bidang pendaftaran, bidang pelayanan, bidang penatausahaan dan bidang keuangan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner karakteristik responden dalam penelitian ini di klarifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, adapun rinciannya sebagai berikut.

4.3.1 Responden Penelitian

Tabel 4.3 Responden Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase %
1.	Kuesioner yang disebar	40	100%
2.	Kuesioner yang kembali	40	100%
3.	Kuesioner yang tidak kembali	0	0
4.	Kuesioner yang dapat diolah	40	100%

Sumber data primer tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 sebanyak 40 kuesioner yang dibagikan dan jumlah yang kembali 40 dalam artian 100% responden mengisi kuesioner yang telah dibagikan. Penyebaran sebanyak 40 kuesioner pada tanggal 31 Mei 2023 dan pengembalian kuesioner pada tanggal 5 Juni 2023, sebanyak 40 kuesioner dikembalikan dapat diolah seluruhnya.

4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.4 Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-Laki	17	43%
2.	Perempuan	23	58%
	Total	40	100%

Sumber data primer tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 karakteristik responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17% dengan persentase 43% dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 23 dengan persentase 58% dimana jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki.

4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.5 Responden berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20-30 Tahun	23	58%
2.	31-40 Tahun	10	25%
3.	>41 Tahun	7	18%
	Total	40	100%

Sumber data primer tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 karakteristik responden berdasarkan Usia, responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 23 orang atau 58%. Responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 10 orang atau 25%. Kemudian responden yang berusia lebih dari >41 tahun berjumlah 7 orang atau 18%. Sehingga dapat disimpulkan jumlah responden yang mendominasi berdasarkan Usia pegawai produktif yaitu berada pada jenjang Usia 20 sampai dengan 30 tahun dengan jumlah responden sebanyak 23 orang.

4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.6 Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	12	30%
2.	S1	26	65%
3.	S2	2	5%
	Total	40	100%

Sumber data primer tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 karakteristik responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA berjumlah 12 orang atau 30% dari total responden, pendidikan terakhir S1 berjumlah 26 orang atau 65% dan S2 berjumlah 2 orang atau 5%. Jika dilihat dari jumlah dan persentase maka jumlah responden terbanyak berdasarkan klasifikasi yaitu ada pada responden dengan lulusan S1.

4.4 Uji Instrumen

4.4.1 Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 20 dengan teknik pengujian *pearson product moment*, pengujian validitas ini menggunakan *person correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada

responden. Pada tingkat signifikan 0,025 dan responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah (N) = 40 responden dengan r tabel > 0,312. Pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila r hitung bernilai positif dan lebih besar dari r tabel.

Tabel 4.7 uji validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah	X1	0,591	0,312	Valid
	X2	0,584	0,312	Valid
	X3	0,407	0,312	Valid
	X4	0,383	0,312	Valid
	X5	0,515	0,312	Valid
	X6	0,403	0,312	Valid
	X7	0,552	0,312	Valid
	X8	0,461	0,312	Valid
	X9	0,457	0,312	Valid
	X10	0,429	0,312	Valid
Pendapatan Asli Daerah	Y1	0,751	0,312	Valid
	Y2	0,493	0,312	Valid
	Y3	0,719	0,312	Valid
	Y4	0,665	0,312	Valid
	Y5	0,614	0,312	Valid

Sumber: Data hasil olahan SPSS Ver.20, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan kuesioner pada variabel Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan r hitung yang lebih besar dari r tabel sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan variabel dinyatakan valid dan data yang dikumpulkan dapat menghasilkan data yang baik.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pernyataan dalam bentuk kuesioner. Pengukuran reliabilitas menggunakan *cronbach's*

alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	N of Items
Sistem Penggunaan Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah	0,614	10
Pendapatan Asli Daerah	0,661	5

Sumber: Data hasil olahan SPSS Ver.20, 2023

Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel Sistem Penggunaan Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah memiliki nilai 0,614 dengan 10 pertanyaan pada kuesioner yang telah disebar, dan variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai 0,661 dengan 5 pertanyaan pada kuesioner yang disebar.

Tabel 4.9 rekapitulasi uji reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach,s</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penggunaan Sistem Aplikas Pajak Dan Retribusi Daerah	0,614	0,60	Reliabel
Pendapatan Asli Daerah	0,661	0,60	Reliabel

Sumber: Data hasil olahan SPSS Ver.20, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *alpha cronbach,s* yang lebih besar dari 0,60. variabel Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah (X) memiliki nilai 0,614 dan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) 0,661. Hal ini membuktikan kuesioner adalah reliabel karena *r alpha* memiliki nilai $> 0,60$.

4.4.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri atas satu variabel dependent dan satu variabel independent, berikut hasil uji analisis regresi linear sederhana:

1. Uji T

Uji T digunakan untuk membuktikan pengaruh antara Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.10 hasil uji regresi linear sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.773	4.640		2.106	0.042
Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah	0.293	0.103	0.417	2.829	0.007

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber output SPSS Ver.20,2023

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji regresi linear sederhana dapat di analisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 9,773 + 0,293X + e$$

Dari persamaan di atas dapat di jelaskan bahwa koefisien regresi variabel Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah (X) sebesar 0,293 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel metode perhitungan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1. Nilai Konstanta sebesar 9,773 artinya bahwa apabila tidak ada Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah atau sama dengan nol maka Pendapatan Asli Daerah Sebesar 9,773.
2. Nilai Koefisien Regresi sebesar 0,293 artinya bahwa setiap ada kenaikan Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,293.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada tabel Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena nilai t hitung $2,829 > t$ tabel $1,684$ serta memiliki nilai sig $0,007$ dinyatakan lebih kecil dari tarif kepercayaan $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan variabel Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.11 uji koefisien determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.417 ^a	0.174	0.152	1.709

a. Predictors: (Constant), Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah

b. Dependent Variabel, PAD

Sumber output SPSS Ver.20,2023

Dari model summary di atas dapat dilihat hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R Square sebesar 0,174 yang berarti bahwa hubungan Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah antara

Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,4%. Sedangkan sisanya 82,6% (100%-17,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan bahwa variabel yang diikutsertakan dalam penelitian ini telah memenuhi kualitas yang baik, yaitu valid dan reliabel. Sehingga diperoleh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo. Teori Agensi jika dikaitkan dengan Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah dimana Perusahaan mengharapkan hal yang diinginkan oleh wajib pajak. Hal ini Penggunaan Sistem Aplikasi Diharapkan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Wajib pajak dalam menyetorkan kewajibannya kepada petugas kantor bapenda. Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah di bapenda Kota Palopo disebut dengan Sistem Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPADA)

Berdasarkan hal tersebut Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah (Simpada) sangat efektif dalam mengurangi kecurangan terhadap pelaporan pajak. Hal ini karena Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah akan berdampak signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah baru berlangsung dari tahun 2021-sekarang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani (2021) berkaitan dengan Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo. Menunjukkan hasil bahwa Penggunaan Alat *Mobile Payment Online System* Berpengaruh Positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jeneponto.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian hasil penelitian terkait Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka terdapat beberapa saran yang direkomendasikan untuk meningkatkan Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo dan sebagai perbaikan masa mendatang sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan adanya pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo (SIMPADA). Untuk itu khususnya pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Palopo yang menjadi subjek dalam penelitian ini, perlu adanya memperhatikan Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah (SIMPADA) yang digunakan baik dalam memahami penggunaannya ataupun dalam hal mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dalam mengelolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Bagi Peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan masalah yang sama diharapkan subjek penelitian tidak hanya berfokus pada satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) seperti dalam penelitian ini hanya berfokus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Palopo saja, Namun diharapkan dapat melakukan penelitian pada beberapa SKPD agar dapat menggambarkan secara umum dan luar mengenai Pengaruh Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, Icek and Martin Fishbein. 1980. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood: Prentice Hall
- Chodijah, S. (2018). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi Dki Jakarta*. 8(1), 34-48
- Gomes, Stevanus J. Dan Victor Pattiasina. 2011. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara*. Aset : Volume 13, Nomor 2, Halaman 175-183.
- Indrajit Richardus Eko 2011:2. *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jogiyanto, H.M., 2005, *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, ANDI, Yogyakarta
- Kadir., dan Triwahyuni. 2014. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: ANDI
- Komala, Y., & Arifiani, R. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta*. 9(1).
- Kurniasari, E. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening*.
- Liliani, P. 2020. Analisis Faktor yang Memengaruhi Niat Pengguna Pada Gopay Dengan Pendekatan *Technology Acceptance Model*. *Jurnal Bima Manajemen*, 9(1): 44-60.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta:C.V Andi Offset.
- Martani, Dwi. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi*. Slide Materi Perpajakan dan Akuntansi *National Workshop in Accounting Education: Valuation, IFRS, and Taxation*
- Maulana, Y. (2022). *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bapenda Kab. Bulukumba*.
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat*. Jakarta: Salemba Empat

- Mulyani, S. 2021. (2021). *Pengaruh Penggunaan Sistem Mobile Payment Online System (MPOS) Terhadap Penignkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bapenda Kabupaten Jeneponto)*.
- Nurlan (2008: 35-36) Tentang *Retribusi Daerah*
- PP No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
- Putri, R. D. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto*.
- Sartika, D., & Yuliantoro, R. (2019). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur*. 1-20
- Sutarman, 2009. *Pengantar Teknologi Informasi. Yang Menerbitkan PT Bumi Aksara : Jakarta*.
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81.
- Roni, C. C. 2021. (2021). *Penerapan Kebijakan With Holding Tax System Terhadap Jasa Pemasangan Reklame Di Bapenda Kota Palopo*.
- 2021, S. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng*.
- Sefandra, G. I. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Kota Batam*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Yogyakarta: Sukses Pustaka
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Statistik Nonparametrik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Yogyakarta: Sukses Pustaka
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).